

# **CaLK**

( **CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN** )

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN DEMAK**

### **Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2018

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Demak

**AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT**

Pembina Tk. I

NIP. 19730517 199803 1 007

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan**

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

## **1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Demak

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Demak
- r. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Demak

### **1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD**

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

#### **BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

#### **BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Operasional
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Neraca

#### **BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

#### **BAB VI : PENUTUP**

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2018 melaksanakan urusan wajib / pilihan bidang **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	<b>PENDAPATAN</b>	93,250,000	93,670,000	100.45%
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	93,250,000	93,670,000	100.45%
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	93,250,000	93,670,000	100.45%
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	75,250,000	75,670,000	100.56%
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75,250,000	75,670,000	100.56%
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	18,000,000	18,000,000	100.00%
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus	18,000,000	18,000,000	100.00%
5	<b>BELANJA</b>	157,897,652,000	154,051,231,501	97.56%
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6,114,600,000	5,849,104,303	95.66%
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6,114,600,000	5,849,104,303	95.66%
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,800,000,000	4,537,734,603	94.54%
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,589,682,297	3,436,238,718	95.73%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	404,091,225	397,959,722	98.48%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	120,199,000	105,560,000	87.82%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	213,456,250	204,355,000	95.74%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	311,768,100	258,756,660	83.00%
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,381,723	2,040,946	46.58%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	140,000	61,388	43.85%
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	117,328,126	98,453,602	83.91%
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8,423,780	7,039,494	83.57%
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	30,529,499	27,269,073	89.32%
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,314,600,000	1,311,369,700	99.75%
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,314,600,000	1,311,369,700	99.75%
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	151,783,052,000	148,202,127,198	97.64%
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1,933,060,000	1,858,535,000	96.14%
5.2.1.01	Honorarium PNS	482,100,000	441,150,000	91.51%
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,200,000	106,850,000	90.40%
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	36,000,000	36,000,000	100.00%
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	175,000,000	175,000,000	100.00%
5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	72,600,000	63,000,000	86.78%
5.2.1.01.06	Honorarium petugas entry data	10,800,000	10,800,000	100.00%
5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	21,500,000	1,500,000	6.98%
5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	48,000,000	48,000,000	100.00%
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,288,450,000	1,263,650,000	98.08%
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,198,450,000	1,196,150,000	99.81%
5.2.1.02.08	Honorarium Petugas Lapangan	90,000,000	67,500,000	75.00%
5.2.1.03	Uang Lembur	162,510,000	153,735,000	94.60%
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	97,170,000	88,410,000	90.98%
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	65,340,000	65,325,000	99.98%

5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41,980,036,600	40,517,355,198	96.52%
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	966,317,020	851,295,200	88.10%
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	131,978,400	124,692,000	94.48%
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20,000,000	9,955,000	49.78%
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10,000,000	9,994,000	99.94%
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	260,724,520	177,778,000	68.19%
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	543,614,100	528,876,200	97.29%
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,025,000,000	1,018,982,000	99.41%
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Hurugan	1,025,000,000	1,018,982,000	99.41%
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295,569,500	262,140,922	88.69%
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,500,000	5,980,822	79.74%
5.2.2.03.02	Belanja Air	0	0	0.00%
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0	0	0.00%
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15,000,000	8,667,000	57.78%
5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24,500,000	0	0.00%
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1,000,000	960,000	96.00%
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	163,500,000	163,500,000	100.00%
5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	84,069,500	83,033,100	98.77%
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15,393,900	15,248,885	99.06%
5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	6,842,040	6,777,586	99.06%
5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	8,551,860	8,471,299	99.06%
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750,000,000	505,636,700	67.42%
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	175,000,000	77,555,000	44.32%
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	325,000,000	225,355,000	69.34%
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200,000,000	176,003,000	88.00%
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50,000,000	26,723,700	53.45%
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186,995,250	141,336,000	75.58%
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79,600,000	58,156,000	73.06%
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103,250,000	82,280,000	79.69%
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4,145,250	900,000	21.71%
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	377,576,130	227,312,000	60.20%
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	61,738,820	54,229,000	87.84%
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160,640,000	95,195,000	59.26%
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	50,000,000	24,076,000	48.15%
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	105,197,310	53,812,000	51.15%
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	104,252,000	99,028,000	94.99%
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	104,252,000	99,028,000	94.99%
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	683,732,800	481,596,491	70.44%
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	326,900,000	253,800,000	77.64%
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	356,832,800	227,796,491	63.84%
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	220,000,000	217,930,000	99.06%
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200,000,000	198,000,000	99.00%
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000	19,930,000	99.65%
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,870,000,000	1,809,036,000	96.74%
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225,000,000	213,842,000	95.04%
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000	197,934,000	98.97%
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00%
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Meubeleur	10,000,000	9,850,000	98.50%
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Saluran	1,435,000,000	1,387,410,000	96.68%

5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Saluran	1,435,000,000	1,387,410,000	96.68%
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,400,000,000	1,364,033,000	97.43%
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350,000,000	345,161,000	98.62%
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	550,000,000	530,290,000	96.42%
5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	350,000,000	339,497,000	97.00%
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	150,000,000	149,085,000	99.39%
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34,067,500,000	33,523,780,000	98.40%
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	34,067,500,000	33,523,780,000	98.40%
5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17,700,000	0	0.00%
5.2.2.28.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17,700,000	0	0.00%
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	107,869,955,400	105,826,237,000	98.11%
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	450,000,000	404,434,000	89.87%
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	450,000,000	404,434,000	89.87%
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200,000,000	198,535,000	99.27%
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	200,000,000	198,535,000	99.27%
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	73,000,000	71,600,000	98.08%
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	73,000,000	71,600,000	98.08%
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	120,000,000	89,100,000	74.25%
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	120,000,000	89,100,000	74.25%
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100,000,000	98,436,000	98.44%
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100,000,000	98,436,000	98.44%
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	256,955,400	186,400,000	72.54%
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	18,000,000	18,000,000	100.00%
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	156,000,000	128,150,000	82.15%
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	35,955,400	17,650,000	49.09%
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	47,000,000	22,600,000	48.09%
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7,015,000,000	6,952,650,000	99.11%
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150,000,000	149,250,000	99.50%
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	100,000,000	99,650,000	99.65%
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,250,000,000	1,225,300,000	98.02%
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	350,000,000	347,900,000	99.40%
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	550,000,000	547,020,000	99.46%
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	300,000,000	297,500,000	99.17%
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4,315,000,000	4,286,030,000	99.33%
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	600,000,000	595,730,000	99.29%
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	600,000,000	595,730,000	99.29%

5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0	0	0.00%
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0	0	0.00%
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75,610,000,000	74,109,279,000	98.02%
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	75,610,000,000	74,109,279,000	98.02%
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0	0	0.00%
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	7,655,000,000	7,595,411,000	99.22%
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	7,655,000,000	7,595,411,000	99.22%
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1,850,000,000	1,838,620,000	99.38%
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	1,850,000,000	1,838,620,000	99.38%
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0	0	0.00%
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	1,050,000,000	1,044,740,000	99.50%
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1,050,000,000	1,044,740,000	99.50%
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	575,000,000	572,540,000	99.57%
5.2.3.65.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	125,000,000	124,070,000	99.26%
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	450,000,000	448,470,000	99.66%
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	170,000,000	168,690,000	99.23%
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	170,000,000	168,690,000	99.23%
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	4,775,000,000	4,746,890,000	99.41%
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	4,575,000,000	4,548,120,000	99.41%
5.2.3.67.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pembuangan Air Kotor	200,000,000	198,770,000	99.39%
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0	0	0.00%
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0	0	0.00%
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	6,420,000,000	6,220,172,000	96.89%
5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	5,720,000,000	5,523,942,000	96.57%
5.2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	200,000,000	198,630,000	99.32%
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	500,000,000	497,600,000	99.52%
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	950,000,000	933,010,000	98.21%
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	950,000,000	933,010,000	98.21%



## 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan **Wajib** di bidang **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** selama tahun 2018, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada.

Beberapa program kegiatan pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak **tidak dapat dilaksanakan** secara sepenuhnya diantaranya : (Terlampir)

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual.

Sebagai langkah awal laporan keuangan OPD DINPERKIM tahun 2018 akan disajikan menggunakan basis akrual.

#### **3.1. Entitas Pelaporan**

1. Entitas pelaporan unit Pemerintah Daerah yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam hal ini adalah OPD DINPERKIM Kabupaten Demak. Laporan keuangan tersebut berupa :
  - Laporan realisasi anggaran
  - Neraca
  - Laporan Operasional
  - Laporan Perubahan Ekuitas
  - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

#### **3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah Basis Akrual.

Basis akrual untuk laporan keuangan berarti bahwa beban, asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tersebut telah selesai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **3.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka harus memenuhi prasyarat normatif yaitu :

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

#### 4.1 Laporan Realisasi Anggaran

##### 4.1.1 Pendapatan

###### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya:

1. Pendapatan Pajak Rp.0,- dengan pendapatan sebesar Rp.0,- yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.0,- Sehingga terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,- yang diakui sebagai Pendapatan ditangguhkan. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %,
2. Pendapatan Retribusi Daerah dengan pendapatan sebesar Rp. 93.250.000,- yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 93.670.000,- Sehingga terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 420.000,- Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 93.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.670.000,- atau 100,45%.

Dari target anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2018 sesuai dengan target realisasi pendapatan atau 100,45 %.

##### 4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
	<b>BELANJA</b>	157,897,652,000	154,051,231,501	97.56%	115,257,424,479
1	BELANJA OPERASI	50,027,696,600	48,224,994,501	96.40%	12,775,776,979
2	BELANJA MODAL	107,869,955,400	105,826,237,000	98.11%	102,481,647,500

###### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 sebagai berikut :

NO	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		
	<b>BELANJA OPERASI</b>	50,027,696,600	48,224,994,501	96.40%	12,775,776,979
1	Belanja Pegawai	8,047,660,000	7,707,639,303	95.77%	6,940,274,818
2	Belanja Barang dan Jasa	41,980,036,600	40,517,355,198	96.52%	5,835,502,161

Belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp. 50,027,696,600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 48,224,994,501,-** atau **96,40 %**. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

### 1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, retribusi daerah, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan penghasilan PNS.

NO	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
	<b>Belanja Pegawai</b>	8,047,660,000	7,707,639,303	95.77%	6,940,274,818
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,800,000,000	4,537,734,603	94.54%	4,356,392,818
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,314,600,000	1,311,369,700	99.75%	1,154,625,000
3	Honorarium PNS	482,100,000	441,150,000	91.51%	385,450,000
4	Honorarium Non PNS	1,288,450,000	1,263,650,000	98.08%	893,442,000
5	Uang Lembur	162,510,000	153,735,000	94.60%	150,365,000
6	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/M	-	-		

Belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp. 8,047,660,000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 7,707,639,303,-** atau **95,77%**.

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa, belanja makan / minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan pelatihan, belanja jasa konsultasi, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja barang dan jasa.

NO	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>41,980,036,600</b>	<b>40,517,355,198</b>	<b>96.52%</b>	5,835,502,161
1	Belanja Bahan Pakai Habis	966,317,020	851,295,200	88.10%	881,157,250
2	Belanja Bahan/Material	1,025,000,000	1,018,982,000	99.41%	720,350,000
3	Belanja Jasa Kantor	295,569,500	262,140,922	88.69%	451,839,856
	Belanja Premi Asuransi	15,393,900	15,248,885	99.06%	902,880
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750,000,000	505,636,700	67.42%	502,490,911
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	186,995,250	141,336,000	75.58%	191,352,900
6	Belanja Makanan dan Minuman	377,576,130	227,312,000	60.20%	211,019,100
	Belanja Pakaian Kerja	104,252,000	99,028,000	94.99%	0
7	Belanja Perjalanan Dinas	683,732,800	481,596,491	70.44%	334,954,264
8	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	220,000,000	217,930,000	99.06%	99,000,000
9	Belanja Pemeliharaan	1,870,000,000	1,809,036,000	96.74%	1,446,200,000
10	Belanja Jasa Konsultansi	1,400,000,000	1,364,033,000	97.43%	996,235,000
11	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34,067,500,000	33,523,780,000	98.40%	0
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17,700,000	0	0.00%	0

Belanja barang / jasa Tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar **Rp. 41,980,036,600,-** dan direalisasikan sebesar **Rp 40,517,355,198,-** atau **96,52%**.

#### **b. Belanja Modal**

Belanja Modal OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>107,869,955,400.00</b>	<b>105,826,237,000.00</b>	<b>98.11%</b>	102,481,647,500
1	Belanja Peralatan dan Mesin	1,199,955,400.00	1,048,505,000.00	87.38%	981,083,500
2	Belanja Bangunan dan Gedung	7,615,000,000.00	7,548,380,000.00	99.13%	2,542,647,000
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,055,000,000.00	97,229,352,000.00	98.16%	98,957,917,000

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 107,869,955,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 105,826,237,000,- atau sebesar 98,11%.

#### **1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1,199,955,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,048,505,000,- dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir )

## **2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7,615,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,548,380,000,- dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir)

## **3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

Akum ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.99,055,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97,229,352,000,- dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir)

### **c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama**

OPD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama.

## **4.2 Laporan Operasional**

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

### **4.2.1 Pendapatan (LO)**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak selama tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya:

1. OPD DINPERKIM Kab. Demak menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- Pembayaran Piutang Pajak Tahun 2018 sebesar Rp 0,-
2. OPD DINPERKIM Kab. Demak menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 93,250,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93,670,000,-

#### **b. Pendapatan Transfer**

OPD DINPERKIM Kab. Demak Pendapatan transfer tahun 2018 sebesar Rp.0,-

#### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

OPD DINPERKIM Kab. Demak pada tahun 2018 memperoleh Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp.351.172.171,-

#### **4.2.2 Beban**

Beban meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dan Beban Dana Otonomi Khusus untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2018 mencatat Empat Beban, Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

##### **a. Beban Pegawai**

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2018. Beban Pegawai pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak periode tahun 2018 sebesar Rp7.707.639.303,-

##### **b. Beban Barang dan Jasa**

Akun ini menggambarkan Beban Barang dan Jasa selama periode tahun 2018. OPD Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Barang dan Jasa periode tahun 2018 sebesar Rp. 40.029.911.761,-

##### **c. Beban Hibah**

Akun ini menggambarkan Beban Hibah selama periode tahun 2018. OPD Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Hibah periode tahun 2018 sebesar Rp.93.807.538.524,-

##### **d. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Akun ini menggambarkan Beban Penyusutan dan Amortisasi selama periode tahun 2018. OPD Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Penyusutan dan Amortisasi periode tahun 2018 sebesar Rp. 4.327.716.434,-

#### **4.3 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan tentang :

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
4. Ekuitas akhir

## 4.4 Neraca

### 4.4.1 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp 8.927.915.412,00 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 320.000,00, Investasi Jangka panjang sebesar Rp 0,- Aset tetap sebesar Rp .8.927.595.412,00 serta Aset lainnya sebesar Rp. 0,-

#### a. Aset Lancar

##### 1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2018 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp.0,-, dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp. 0,-

##### 2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan / atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian / atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per. 31 Desember 2018 Saldo Piutang OPD DINPERKIM Kab. Demak adalah sebesar Rp.0,-

##### 3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,-

###### a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 dari Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp.0,00 sehingga Piutang Pajak yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,00

###### b. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang sebesar Rp.0,- sehingga Piutang Retribusi yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

##### 4) Beban dibayar dimuka

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember OPD DINPERKIM Kab. Demak mencatat beban dibayar dimuka sebesar Rp.0,-

Belanja Asuransi bangunan dan gedung OPD DINPERKIM Kab. Demak sebesar Rp.0,- dengan masa jaminan s.d tanggal 31 Desember 2018 maka diakui sebagai beban asuransi tahun 2018 sebesar Rp.0,- dan beban dibayar dimuka asuransi sebesar Rp.0,-

##### 5) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 320.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Per. 31 Desember 2018 OPD DINPERKIM Kab. Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang /bahan dengan rincian sebagai berikut :



## Daftar Persediaan Barang Tahun 2018

NO.	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2018			Ket.
		Satuan	Hrg. Satuan	Jumlah	
1	Tinta Komputer Hitam	3 Buah	Rp 30,000.00	Rp 90,000.00	
1	HVS Folio Berwarna 70 gr	5 Rim	Rp 46,000.00	Rp 230,000.00	

Persediaan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 320.000,-

**b. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap OPD DINPERKIM Kab. Demak per 31 Desember 2018 Rp. 8.927.595.412,00 Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 /12/ 2018	PER 31 /12/ 2017
1	Tanah	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	8,882,616,002.00	8,117,704,842.00
3	Gedung dan Bangunan	567,861,000.00	567,861,000.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,131,640,000.00	0.00
5	Akumulasi Penyusutan	(5,526,410,071.00)	(4,774,823,813.00)
6	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	3,871,888,881.00	730,158,636.00

**1) Tanah**

OPD DINPERKIM Kab. Demak Per. 31 Desember 2018 mencatat aset tanah sebesar Rp. 0,- dikarenakan Tanah pada OPD DINPERKIM menyatu dengan OPD DINPUTARU

**2) Peralatan dan Mesin**

Per. 31 Desember 2018, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.882.616.002,- naik sebesar Rp. 764.911.160,- dari tahun 2017

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp.1.048.505.000,-penambahan karena mutasi dari OPD lain sebesar Rp. 112.500.000,- koreksi tambah sebesar Rp 112.500.000,-.

Sedangkan pengurangan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari penghapusan Rp. 15.462.560,- pengurangan karena mutasi aset ke OPD keluar sebesar Rp. 6.181.280,- pengurangan koreksi sebesar Rp.112.500.000,- serta penghapusan aset lainnya sebesar Rp.374.450.000,-

**PERALATAN DAN MESIN**

Saldo per 31/12/2017		<b>8,117,704,842.00</b>
Penambahan tahun 2018		
	Belanja Modal	1,048,505,000.00
	Mutasi OPD Tambah	112,500,000.00
	Koreksi Tambah	112,500,000.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	1,273,505,000.00
Pengurangan tahun 2018		
	Penghapusan	15,462,560.00
	Mutasi OPD Keluar	6,181,280.00
	Koreksi Keluar	112,500,000.00
	Penghapusan Aset Lainnya	374,450,000.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	508,593,840.00
Saldo per 31/12/2018		<b>8,882,616,002.00</b>

**3) Gedung dan Bangunan**

Per. 31 Desember 2018, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp.567.861.000,- sama seperti tahun 2017

Penambahan aset bangunan dan gedung bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp. 7.548.380.000,- penambahan dari Atribusi sebesar Rp. 190,281,773,-

Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung bersumber dari Penghapusan Rp 5,845,006,507,- Mutasi OPD Keluar sebesar Rp. 387,410.000,- terdapat koreksi KDP sebesar Rp. 1,635,484,979,-

**GEDUNG DAN BANGUNAN**

Saldo per 31/12/2017		<b>567,861,000.00</b>
Penambahan tahun 2018		
	Belanja Modal	7,548,380,000.00
	Atribusi	190,281,773.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	7,738,661,773.00
Pengurangan tahun 2018		
	Penghapusan	5,845,006,507.00
	Mutasi OPD Keluar	387,410,000.00
	Koreksi KDP Keluar	1,506,245,266.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	7,738,661,773.00
Saldo per 31/12/2018		<b>567,861,000.00</b>

**4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Per. 31 Desember 2018, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.1,131,640,000,-

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp97,229,352,000.00,- penambahan dari Atribusi sebesar Rp. 296,553,173,- Penambahan dari hibah APBN sebesar Rp.351,172,171,- sedangkan pengurangan atas aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber

dari penghapusan sebesar Rp91,155,445,619,- Mutasi keluar sebesar Rp 3,954,506,746,- Koreksi keluar sebesar Rp 1,635,484,979,-

#### **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo per 31/12/2017		<b>00.00</b>
Penambahan tahun 2018		
	Belanja Modal	97,229,352,000.00
	Atribusi	296,553,173.00
	Penambahan Hibah APBN	351,172,171.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	97,877,077,344.00
Pengurangan tahun 2018		
	Penghapusan	91,155,445,619.00
	Mutasi OPD Keluar	3,954,506,746.00
	Koreksi KDP Keluar	1,635,484,979.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	96,745,437,344.00
Saldo per 31/12/2018		<b>1,131,640,000.00</b>

**5) Aset Tetap Lainnya**

Per. 31 Desember 2018, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,-

**6) Konstruksi dalam Pekerjaan**

Per. 31 Desember 2018, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp.3,871,888,881,- secara rinci dijelaskan sbb:

#### **KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN**

Saldo per 31/12/2017		<b>730,158,636.00</b>
Penambahan tahun 2018		
	Koreksi Tambah	3,141,730,245.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	3,141,730,245.00
Pengurangan tahun 2018		
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	0.00
Saldo per 31/12/2018		<b>3,871,888,881.00</b>

**7) Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.526.410.471,- secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut : (Terlampir)

**8) Aset Lainnya**

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2018, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap. Jumlah aset lainnya sebesar Rp. 0,-

**4.4.2 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2018 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban sebagai berikut :

#### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per. 31 Desember 2018 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Utang PFK

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa utang PFK terdiri dari :

- Utang PPN sebesar Rp.0,-
- Utang PPh. 21 sebesar Rp.0,-
- Utang PPh. 22 sebesar Rp.0,-, dll.

2) Utang bunga

3) Pendapatan diterima dimuka

Per. 31 Desember 2018 OPD DINPERKIM Kab. Demak mencatat Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 0,-

4) Utang beban

Utang beban pada OPD DINPERKIM Kab. Demak terdiri dari :

- Utang beban Listrik PLN sebesar Rp. 0,-
- Utang beban Air PDAM sebesar Rp. 0,-
- Utang beban Telpon sebesar Rp. 0,-

Untuk beban Listrik PLN dan beban Air PDAM pada OPD DINPERKIM masih menyatu dengan OPD DINPUTARU.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya

#### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2018 OPD DINPERKIM Kab. Demak Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang

#### **4.4.3 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2018 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. **8.927.915.412,00**.

## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, OPD DINPERKIM Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubag Program dan Keuangan
5. Kabid Perumahan
6. Kasi Pembangunan Perumahan
7. Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
8. Kasi Kebersihan
9. Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman
10. Kasi Penyediaan Infrastruktur Permukiman
11. Kasi Penataan Lingkungan Permukiman
12. Kasi Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum

Adapun Visi dan Misi OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah :

Visi :

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang Layak, Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan

Misi :

1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terkait
3. Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman yang berbasis masyarakat
5. Membangun sistem pengawasan bangunan yang efektif dan efisien

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja OPD DINPERKIM Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.